

DILAKSANAKAN PEMKAB BANYUMAS
Operasi Pasar Minyak Goreng

BANYUMAS (KR) - Untuk mengendalikan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar operasi pasar minyak goreng murah di sejumlah pasar tradisional, Selasa-Rabu, di sejumlah pasar tradisional. Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan dalam operasi ini disediakan 31.100 liter minyak goreng.

Menurutnya, operasi pasar minyak goreng dilaksanakan dengan menggandeng para pedagang kecil sebagai upaya menghindari terjadinya kerumunan warga. Untuk tahap awal, operasi minyak goreng digelar di tiga lokasi, yakni Pasar Proliman, Pasar Sangkalputung Sokaraja dan Pasar Kemukusan Sumbang, masing-masing mendapat alokasi sebanyak 2.400 liter.

Selain menggelar operasi pasar minyak goreng di pasar tradisional, Pemkab Banyumas juga mengalokasikan minyak goreng murah untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM dan mekanisme penjualannya akan diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. "Pemerintah akan bertindak tegas terhadap pedagang yang terlibat dalam operasi pasar namun menjual minyak goreng murah tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Achmad Husein didampingi Kepala Dinperindag Kabupaten Banyumas, Titik Puji Astuti. **(Dri)**

CEGAH KEBAKARAN DI PEKALONGAN
OPD Jadi Sasaran Pelatihan

PEKALAONGAN (KR) - Satuan Polisi Pamong Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Kasatpol P3KPKP) Kota Pekalongan menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk melakukan praktek mencegah kebakaran, baru-baru ini. Dengan begitu, diharapkan jika terjadi kebakaran mereka mampu beraksi dengan menggunakan alat pemadam kebakaran (apar) di kantor masing-masing.

Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid SE mendukung kegiatan tersebut, karena hal itu dinilai sangat penting agar mereka mampu dan lincah mempraktikkan cara menggunakan alat pemadam kebakaran. "Selama ini belum seluruh personel OPD mampu menggunakan alat tersebut," tandasnya. Dengan latihan, diharapkan jika ada kebakaran mereka mampu melakukan pemadaman secara cepat dan tepat. Meski kebakaran langka terjadi, hal itu bisa berakibat fatal jika terjadi dan kita harus melakukan penecagahan secara dini," tegas Walikota.

Pit Kepala Satpol P3KP Kota pekalongan, drg Agust Marhaendayana MM menuturkan, kegiatan ini dilakukan lantaran masih banyak OPD yang belum emnguasai penggunaan alat pemadam kebakaran. Bahkan ada beberapa OPD yang tak memiliki apar. "Tahun lalu ada 35 kasus kebakaran. Tercatat ada 3-4 kasus setiap bulan terjadi. Kebanyakan disebabkan kelalaian manusia yang menyalaikan kompor kemudian ditinggal pergi," jelasnya. **(Riy)**

SATU TAHUN KEPEMIMPINAN JOSSS
Meraih Banyak Penghargaan Bergengsi

WONOGIRI (KR) - Peringatan genap satu tahun kepemimpinan Joko Sutopo-Setyo Sukarno selaku Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berlangsung sederhana, Selasa (1/3).

Refleksi 1 Tahun pelantikan Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) hanya ditandai dengan apel pagi di halaman kantor Bupati Wonogiri yang dipimpin Wabup Setyo Sukarno selaku irup.

Kecuali melibatkan ratusan ASN di lingkungan Setda Wonogiri, peringatan *cli-menan* juga dihadiri para kepala dinas atau OPD Pemkab setempat.

Bupati Joko Sutopo yang

akrab disapa Mas Jekek tidak nampak dalam peringatan Refleksi 1 Tahun pelantikan 'Josss' karena lagi ada acara dinas luar kota.

"Momentum refleksi satu tahun ini sebagai saat paling tepat untuk melakukan evaluasi dan mawas diri atas kinerja kami bersama bupati serta jajaran aparat sipil negara (ASN) dalam satu tahun terakhir ini," ujar Wabup Setyo saat ditemui KR usai papel pagi.

Menurut dia, ada pekerjaan yang perlu diprioritaskan untuk tahun-tahun berikutnya hingga akhir masa jabatan Josss tahun 2024.

"Yakni masalah kemiskinan, pendidikan serta sektor



Setyo Sukarno indeks pembangunan manusia atau IPM," kata pria yang juga Sekretaris DPC PDIP Wonogiri sembari menambahkan IPM Kabupaten Wonogiri masih terendah di

wilayah Soloraya.

Kendati masih dihadapkan pada persoalan yang kompleks namun Wabup Wonogiri bersyukur di masa Pandemi Covid 19 ini daerahnya dalam satu tahun terakhir banyak meraih penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat maupun provinsi Jateng.

Salah satunya, tutur Setyo, penghargaan IGA penghargaan bidang perencanaan pembangunan daerah.

"Kita yang terbaik di Jawa Tengah dan mohon doa restu segenap elemen masyarakat termasuk rekan-rekan media, tahun ini Wonogiri maju tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Tengah,"

lanjut dia.

Sesuai visi misi Josss dengan semangat *Go Nyawiji Sesarengan mBangun Wonogiri* ingin menjadikan Kabupaten Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera, Setyo minta jajaran ASN tetap memegang komitmen, meski dana APBD banyak difocusing akibat pandemi. "Justru dengan efisiensi anggaran ini kita bersyukur bisa mewujudkan kerja efektif, produktif dan profesional," tandasnya.

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2021 baru tealisasi sekitar 71,25 persen dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 72,45 persen. **(Dsh)**

PERINGATAN HARI JADI KE-451 BANJARNEGARA

Di-'Launching' Lambang Daerah Baru

BANJARNEGARA (KR) - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-451 Sabtu (26/2) digelar secara sederhana di pendapa rumah dinas bupati. Atas pertimbangan masih dalam suasana pandemi Covid-19, kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan masyarakat umum tak diperbolehkan mengikuti prosesi acara tahunan tersebut.

Prosesi peringatan diawali dengan kirab panji lambang daerah dan bendera merah putih di halaman pendapa dengan peserta sejumlah prajurit bersama Sekda Banjarnegara Indarto yang membawa pataka dan song-song. Sampai di pendapa,

Pelaksana Harian Bupati Banjarnegara H Syamsudin menerima bendera, sedangkan Ketua DPRD Iswawan Setya Handoko menerima lambang daerah.

Prosesi hari jadi kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa DPRD dipimpin Ketua Dewan Ismawan Setya Handoko, dihadiri oleh 75 pimpinan instansi di lingkungan Pemkab Banjarnegara. Semua mengenakan pakaian adat Jawa. Pejabat lain seperti camat dan kepala desa mengikuti prosesi melalui daring siaran YouTube secara langsung.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Ismawan Setya Handoko mengatakan, peringatan Hari Jadi

ke-451 pada 26 Februari mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara. "Sebelumnya, hari jadi Banjarnegara adalah 22 Agustus 1831, kemudian diubah menjadi 26 Februari 1571, setelah melalui penelusuran kajian sejarah," jelasnya.

Usai sidang paripurna istimewa, Pelaksana Harian Bupati Banjarnegara Syamsudin me-launching lambang daerah yang baru, ditandai dengan pemukulan gong. "Perubahan hari jadi Banjarnegara dari 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571 berdampak pula terhadap perubahan lambang daerah," ungkapnya.

Menurutnya, lambang daerah merupakan wujud jatidiri dan eksistensi suatu daerah. Karena itu, lambang daerah yang baru diharapkan membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan masyarakat Banjarnegara

yang bermartabat dan sejahtera. "Kami berharap, perubahan hari jadi dan lambang daerah bisa mendorong kita untuk bangkit, masyarakat guyub rukun dan pembangunan di Banjarnegara menjadi lebih tertata," tandas Syamsudin. **k4laka**



KR-Muchtar M
Penampilan sendratari menceritakan sejarah Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara.

HUKUM

1 ORANG TEWAS
Rem Blong, Bus Pariwisata Tabrak Tebing

PURBALINGGA (KR) - Akibat rem tidak berfungsi, Bus Pariwisata Kalingga Jaya Nopol B 7084 KAA melaju tak terkendali dan menerjang tebing di tepi jalur Bayeman Desa Tlahab Kidul Karangreja Purbalingga, Kamis (3/3) sekitar pukul 04.00.

Kondektur bus, Lukman (20) tewas, sementara 53 penumpang dan sopir mengalami luka-luka.

"Diduga sopir bus belum mengenali kondisi jalan di jalur Bayeman," ungkap Kasat Lantas Polres Purbalingga, AKP Rizky Widyo Pratomo.

Rizky menyebutkan, bus yang dikemudikan Bambang Listyono (38) itu membawa 53 siswa dan guru MI Mihtaful Arif Kudus yang te-

ngah berlibur dan hendak menuju obyek wisata di Baturaden Banyumas.

Rombongan sempat berziarah ke Makam Sunan Kalijaga di Demak dan dilanjut ziarah ke Makam Sakuro di Pekalongan.

Saat melintas di jalur Bayeman, rem bus mendadak tidak berfungsi. Bus meluncur kencang tak terkendali, bus menerjang tebing sisi kiri sekitar 50 meter sebelum jalur penyelamat. Kondektur tewas seketika. Sementara sopir dan penumpang mengalami luka-luka.

Puluhan korban dilarikan ke Puskesmas Karangreja, PKU Muhammadiyah Bobotsari dan RSUD Goetheng Tarunadibrata Purbalingga. **(Rus)**

SIDANG DUGAAN PENGGELOPAN DI PT PPJ
Ada Perjanjian, Bukan Perkara Pidana

BANTUL (KR) - Perkara dugaan penggelapan yang menjerat terdakwa LF bukanlah perkara pidana. Pasalnya LF dengan perusahaan tempatnya bekerja PT Pixel Perdana Jaya (PT PPJ) telah membuat surat perjanjian penyelesaian masalah tagihan/piutang. Apalagi kemudian disusul dengan penyerahan jaminan berupa serpihtakat tanah milik istri LH pada PT PPJ.

"Bukan pidana karena LF selaku Area Manager telah dipaksa mengakui ikut menanggung piutang PT PPJ dengan perjanjian dan jaminan tanah yang akhirnya dipaksa menyerahkan SHM, kemudian bergulir menjadi pidana," ungkap Saksi Ahli JS Murdono SH MHum, dalam sidang pemeriksaan saksi ahli, di PN Bantul, Rabu (2/3).

Saksi yang dihadirkan penasihat hukum LF, Dadang Danie SH, ini menyebutkan bisa menjadi pidana bila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. "Dari faktor

hukum kerugian tersebut akan dibayar dengan jaminan tanah yang nilainya sepadan atau lebih besar dari kerugian. Jadi konteksnya piutang dan arahnya perdاتا," tegas Dosen Pidana FH UJB ini.

Di depan majelis hakim yang diketuai Kurnia Fitriarningsih SH, Murdono menegaskan seharusnya tidak mudah untuk melakukan penyitaan, harus dengan prosedur hukum sesuai aturan berita acara dalam KUHP.

Sebelumnya, Selasa (1/3) saksi Santa dari Toko Happy di Klaten menyebutkan selama ini pembayaran dengan BG dan belum pernah ditagih langsung. "Tidak ada kendala order barang elektronik dari PT PPJ, tidak punya hutang dan jualan tidak ada masalah dari 2016 order ke PT PPJ selalu dilayani baik," jelasnya.

Hanya saja di akhir 2021 pernah distop tidak boleh order karena ada keterlambatan pembayaran 50 hari dari order. **(Vin)**

MENIPU DENGAN MODUS KOPERASI ABAL-ABAL

Istri Pejabat Divonis 1,5 Tahun Penjara

BANTUL (KR) - Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan jeratan pidana Pasal 378 KUHP, GRW istri seorang pejabat Pemkab Bantul, akhirnya divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim PN Bantul yang diketuai Sigit Subagiyo SH MH, Rabu (2/3).

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Petrus Sadiyo SH selama 1 tahun penjara. "Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, unsur-unsur pidana terpenuhi. Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang," tegas hakim.

Diungkapkan, terdakwa dengan bujuk rayu mengajak kerja sama pendirian Koperasi dengan penyer-

taan modal iming-iming bunga 3 persen perbulan telah menggerakkan hati korban Lasiyem warga Kasihan Bantul secara berturut-turut dari Maret 2013 hingga Oktober 2018 menyerahkan uang total Rp 435 juta. Dengan modus yang sama Korban FX G Sistiyo warga Gunung Sempu Kasihan juga terbuju untuk menyerahkan uang total Rp 440 juta kepada terdakwa.

"Kenyataannya terdakwa tidak pernah mengajukan izin pendirian koperasi dan tidak pernah melakukan pengembalian modal. Bahkan uang korban digunakan untuk membeli tanah dan bangunan atau

memenuhi kepentingan sendiri. Hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa dilakukan berlanjut dan yang meringankan Terdakwa mengakui perbuatan dan sopan di persidangan," ungkap Hakim.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang dihadirkan virtual dari Lapas Perempuan Wonosari bersama penasihat hukumnya diberikan kesempatan pikir-pikir selama 7 hari. Demikian pula korban pelapor menyerahkan pada JPU yang juga hadir virtual untuk menyatakan sikap.

"Masih banyak korban lainnya, semuanya adalah teman di lingkungan. Kami percaya karena posisi/jabatan suaminya. Ternyata terdakwa tega menipu. Kita akan ajukan gugatan perdata ganti rugi, apalagi dulu suaminya YS pernah berjanji akan membantu istrinya (GRW) menyelesaikan tanggung jawabnya," ucap Lasiyem dan FX G Sistiyo usai sidang. **(Vin)**

DUGAAN KORUPSI BANKUE DESA
Direktur CV Dijebloskan ke Penjara

PURWOKERTO (KR) - Setelah melakukan penyidikan dan meminta keterangan lebih dari 20 orang saksi serta menyita sejumlah barang bukti, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto Jawa Tengah, Rabu (2/3), menjebloskan Stn (41) Direktur CV JPM yang beralamat di Desa Gentawangi Jatilawang Banyumas, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto.

Tersangka Stn, dijebloskan penjara karena telah melakukan korupsi dana Bantuan Keuangan (Bankue) Desa yang bersumber APBD Banyumas Tahun 2018-2019, senilai Rp 499.050.000.

Kajari Purwokerto, Sunarwan SH MHum, menjelaskan tersangka Stn, pada tahun 2018-2019 mengerjakan proyek bantuan keuangan (Bankue) Desa bersumber dari APBD Banyumas di sembilan desa di Kecamatan Jatilawang, dan Wangon sebanyak 24 titik dengan nilai total proyek Rp 1,7 miliar.

"Dari nilai total proyek, yang merupakan penunjukan langsung yang dikorupsi sebanyak Rp 499. 050.000," jelas Sunarwan. Sedang modus yang di-



KR-Istimewa
Tersangka Stn dibawa ke Lapas Purwokerto.

lakukan pelaku dengan mengurangi volume pekerjaan seperti pengaspalan jalan, dan pembangunan talud jalan.

Nilai proyek bantuan keuangan desa setiap titiknya bervariasi dari Rp 90 juta hingga Rp 190 juta. "Ini proyek penunjukan langsung di bawah Rp 200 juta, namun ada 24 titik dengan jumlah to-

tal Rp 1,7 miliar," ungkapnya.

Dalam kasus korupsi ini, penyidik sudah memintai keterangan lebih dari 20 orang saksi, dan menyita sejumlah dokumen proyek.Dari dokumen tersebut diketahui CV JP diketahui perijinannya sudah mati sejak tahun 2013, namun tetap mengerjakan proyek. **(Dri)**